







 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM	Nomor SOP	OT.01.02-055-055.De.3
	Tanggal Pembuatan	Selasa, 14 November 2017
	Tanggal Revisi	<input type="checkbox"/> Revisi ke
	Tanggal Efektif	Rabu, 02 Mei 2018 <input checked="" type="checkbox"/>
	Disahkan oleh	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM  Jhoni Ginting, S.H., M.H. NIP. 196106121989031003
Judul SOP Inovasi		Pelayanan Fungsional Penyelesaian Kasus Hukum

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHA Pidana) 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHA Perdata) 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 4. Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam 5. Peraturan Menko Polhukam Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan di Kemenko Polhukam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang kasus-kasus hukum pidana maupun perdata 2. Mampu melaksanakan pengamatan secara obyektif dan akuntabel, efisien, dan efektif, serta mampu menjamin kerahasiaan 3. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik 4. Memiliki kemampuan analisis dan menyusun laporan dengan baik 5. Mampu mengoperasikan komputer program microsoft office dan internet dengan baik
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Inovasi Pelayanan Masyarakat di Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor (ATK), Filing Kabinet, lemari besi 2. Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop) 3. Kendaraan roda dua dan empat 4. Telepon, Faksimile, dsb
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan :
Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses pelayanan fungsional penyelesaian kasus hukum	Disimpan dalam data elektronik dan manual

SOP Inovasi Pelayanan Fungsional Penyelesaian Kasus Hukum

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Menko	Deputi	Asdep	Kabid	K/L terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan kepada Asdep terkait untuk menindaklanjuti pengaduan kasus hukum						Surat dan Disposisi Menko	10 Menit	Disposisi/arahan Deputi	
2	Mempelajari kasus hukum dan menugaskan Kabid untuk koordinasi dengan K/L terkait untuk selanjutnya diadakan rapat koordinasi						Disposisi/arahan Deputi	10 Menit	Telaahan + disposisi	
3	Melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan-bahan terkait proses pengaduan hukum						Telaahan + disposisi	90 Menit	Bahan-bahan terkait pengaduan hukum	
4	Melaksanakan rapat koordinasi penyelesaian kasus hukum untuk selanjutnya dibuat rumusan rekomendasi						Bahan-bahan terkait pengaduan hukum	120 Menit	Notula rapat	
5	Menyusun laporan hasil rapat koordinasi penyelesaian kasus hukum untuk disampaikan kepada Asdep untuk diperiksa						Notula rapat	90 Menit	konsep laporan hasil rapat koordinasi penyelesaian kasus hukum	
6	Memeriksa laporan hasil rapat koordinasi penyelesaian kasus hukum, jika setuju dilanjutkan ke Deputi jika tidak dikembalikan ke Kabid untuk diperbaiki						konsep laporan hasil rapat koordinasi penyelesaian kasus hukum	30 Menit	konsep laporan hasil rapat koordinasi penyelesaian kasus hukum telah diperiksa Asdep	

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Menko	Deputi	Asdep	Kabid	K/L terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	
7.	Memeriksa konsep rekomendasi hasil rapat koordinasi penyelesaian kasus hukum, jika setuju dilanjutkan ke Menko untuk disampaikan ke K/L, jika tidak diserahkan ke Asdep untuk diperbaiki						konsep laporan hasil rapat koordinasi penyelesaian kasus hukum telah diperiksa Asdep	30 Menit	konsep laporan hasil rapat koordinasi penyelesaian kasus hukum telah diperiksa Deputi	
8.	Mempelajari dan menyampaikan hasil rekomendasi penyelesaian kasus hukum kepada K/L terkait					konsep laporan hasil rapat koordinasi penyelesaian kasus hukum telah diperiksa Deputi	15 Menit	Surat Rekomendasi		